

Siaran Pers

KOMITMEN SERIUS INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2015-2030

Jakarta (31/7) – Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, telah menyepakati komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) 2015-2030. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang membidik berbagai isu pembangunan, dari kemiskinan hingga kerja sama internasional. SDGs menyempurnakan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium 2000-2015. Meski belum berhasil mencapai semua sasaran indikator, Indonesia terbilang sukses menerapkan MDGs, dengan capaian 47 poin dari total 67 indikator. “Berkaca pada data tersebut, Indonesia berkomitmen serius dalam melaksanakan SDGs dan optimistis mampu meraih hasil lebih baik dari MDGs demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, memastikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta melaksanakan pembangunan inklusif dan melaksanakan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Senin (31/7) siang.

Di Indonesia, implementasi tujuan dan target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan 94 dari 169 target SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebagai contoh, untuk mencapai Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, angka kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan turun hingga 7-8 persen. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional dari 17,75 persen pada 2006 menjadi 10,7 persen pada 2016 dan 10,64 persen pada Maret 2017. Tantangan penurunan tingkat kemiskinan terletak pada angka kedalaman kemiskinan dan tingkat ekstremitas kemiskinan. Untuk menjamin aksesibilitas penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk perlindungan sosial bidang kesehatan, Indonesia melaksanakan program jaminan kesehatan nasional yang telah mencakup lebih kurang 172 juta jiwa atau 66,4 persen dari seluruh penduduk pada 2016.

RPJMN 2015-2019 juga telah menetapkan sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA sederajat sebesar 91,63 persen untuk mendorong terwujudnya Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas. Pada 2016, APK pada jenjang tersebut mencapai 80,89 persen. Untuk meraih Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi, RPJMN 2015-2019 mengamankan sasaran terbangunnya jalan tol sepanjang 1000 kilometer. Selain itu, ada pula target dermaga penyeberangan sebanyak 275 titik pada 2019. Pada 2014, Indonesia tercatat memiliki 210 dermaga. Industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan menjadi 21,6 persen pada 2019, meningkat dari angka saat ini, yaitu 21,39 persen. Untuk Tujuan 14 Ekosistem Kelautan, RPJMN 2015-2019 menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebanyak 11 wilayah. Target tersebut telah tercapai pada 2016. Indonesia juga fokus mengurangi penangkapan ikan secara ilegal dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

“Bagi Indonesia, setiap pelaksanaan agenda pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat adalah sekaligus kontribusi terhadap implementasi SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global,” tegas Menteri Bambang. Wujud komitmen tertinggi Indonesia dalam pelaksanaan SDGs adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut terjadwal akan diluncurkan pada 2 Agustus 2017 mendatang. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang.

Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menguraikan tujuan global, sasaran global, dan sasaran nasional RPJMN 2015-2019. Tujuan global TPB/SDGs terdiri atas 17 tujuan, sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
- 16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
- 17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs di Indonesia mengajak unsur pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, organisasi kemasyarakatan dan media, akademisi dan pakar untuk menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) lima tahunan yang wajib diselesaikan maksimal 12 bulan setelah perpres tersebut ditandatangani Presiden RI, serta Peta Jalan SDGs sampai dengan 2030. Secara berkala, pemerintah juga akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk melihat kemajuan capaian sasaran SDGs.

Jakarta, 31 Juli 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id